

Apa yang dapat pemerintah lakukan untuk meningkatkan perbaikan iklim hutan? Langkah ke depan

Ruang lingkup

Hutan merupakan kesempatan untuk mitigasi perubahan iklim yang tidak boleh dilewatkan oleh negara-negara. Mitra Penilaian Deklarasi Hutan New York menyerukan para pemerintah untuk segera melakukan perubahan radikal untuk mewujudkan mitigasi hutan. Tidak ada solusi singkat - para pemerintah harus menerapkan kombinasi strategi untuk melindungi, memulihi dan pengelolaan hustan lestari.

Selain dari meningkatkan dan menjelaskan ambisi dan investasi untuk mitigasi hutan, kami menguraikan rekomendasi mengenai enam strategi yang pemerintah perlu melaksanakan:

- Memperkuat tata kelola penggunaan lahan dan hutan
- Mengakui dan mengamankan hak masyarakat adat dan komunitas lokal (MAKL)
- · Menyelaraskan insentif dengan tujuan mitigasi hutan
- Mendukung kolaborasi "multistakeholder" sebagai bagian dari pendekatan yurisdiksional
- Memastikan akuntansi dan pemantauan hutan yang matang
- Memperluas tindakan dari sisi permintaan para pemerintah yang mengimpor komoditas berisiko hutan.

Tujuan ke-7 Deklarasi Hutan New York (Declaration on Forests, NYDF) telah dicapai: Perjanjian Paris telah mengonfirmasi peran penting hutan dalam agenda iklim internasional. Ia masih terlalu awal untuk menilai kemajuan implementasi nationally determined contribution (NDC), dan pemerintah hanya akan melaporkan kemajuannya dalam beberapa tahun. Sementara itu, kami menilai kebijakan yang wujud dan memberikan saranan kepada para pemerintah untuk melaksanakan strategi dan mencapai tujuan yang mereka tetapkan.

Terdapat berbagai contoh yang menjanjikan: dari laju penggundulan hutan yang telah berkurang dan dari lembaga serta kebijakan yang dibutuhkan yang telah dibentuk. Namun begitu, berbagai usaha belum memadai dalam menangani masalah rumit penggundulan hutan (deforestasi) dan penggunaan lahan secara tidak berkelanjutan. Para pemerintah masih belum melaksanakan secara sepenuhnya tujuan mereka untuk membatasi pemanasan global; kecenderungan emisi bagi semua sektor, termasuk hutan, menuju arah yang salah. Meskipun memiliki potensi dan peran esensial, hutan mengalami ancaman masif di seluruh dunia.

Kami menemukan banyak indikasi kemajuan dari segi inisiatif pemerintah: sebagai contoh, lebih dari 50 program mengurangi emisi dari penggundulan hutan dan degradasi hutan (REDD+) pada skala nasional; lebih dari 100 pemerintah nasional dengan sistem pemantauan hutan yang kuat dan matang; belasan inisiatif untuk kolaborasi multistakeholder yang melibatkan berbagai pemerintah pada level nasional dan subnasional; dan sebagian dari konsumen terbesar komoditas berisiko hutan telah memulai atau membentuk perundang-undangan untuk membatasi dan mengendalikan impor penggundulan hutan.

Namun, inisiatif-inisiatif ini belum cukup untuk menangani pendorong kuat kehilangan hutan dan penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan. Berbagai tujuan mitigasi hutan secara mendasar bertentangan dengan sistem ekonomi yang mengasumsikan adanya konsumsi dan produksi tanpa batas. Didorong oleh permintaan yang berkembang pesat, hutan dieksploitasi sebagai reservoir sumber daya alam, untuk lahan pertanian dan/atau mineral dan logam. Berbagai unit ekonomi dan politik yang kuat – baik

global maupun domestik – memberikan insentif terhadap eksploitasi dan konversi hutan pada skala yang belum pernah ada sebelumnya. Populasi yang kaya di negara industri Utara, serta kelas menengah serta kaum elit baru di negara berkembang, mendapatkan keuntungan dari komoditas yang berasal dari hutan yang membebankan biaya sosial dan lingkungan kepada pihak luar. Kelompok yang paling dipengaruhi oleh kerusakan ini – populasi miskin dan komunitas lokal yang rentan – didorong untuk terus masuk ke hutan atau mengurbanisasikan permukiman manusia karena kurangnya opsi alternatif bagi pembangunan ekonomi lokal.³⁷

Sebagai akibatnya, dunia masih jauh dari melindungi, memulihkan, dan secara berkelanjutan mengelola hutan. Pengurangan terhadap kehilangan hutan yang dibutuhkan dan berkelanjutan untuk mencapai target Deklarasi Hutan New York (NYDF) 2030 belum pernah terjadi sebelumnya, dan mungkin tidak terjadi dalam waktu dekat. Semua indikator penilaian memperlihatkan kemajuan yang tidak memadai menuju berakhirnya kehilangan hutan dan emisi gas rumah kaca (GRK) yang terkait sebelum 2030 atau bahwa kita bergerak menjauh dari berbagai target tersebut.209 Demikian pula, laju penambahan tutupan hutan tahunan saat ini tidak memadai.

Mitra Penilaian Deklarasi Hutan New York menyerukan para pemerintah untuk meningkatkan dan menjelaskan ambisinya, menyelaraskan investasi dengan tujuan mitigasi hutan, dan mengakui dan menyokong hutan sebagai solusi iklim yang esensial.

AMBISI

Apa yang dapat pemerintah lakukan untuk meningkatkan dan menjelaskan ambisi mereka?

Sebagian besar pemerintah yang telah mengomunikasikan ambisi iklim mereka dalam Perjanjian Paris (kontribusi yang ditetapkan secara nasional, NDC) menyebutkan hutan. Namun, banyak pemerintah yang tidak memberikan target kuantitatif bagi mitigasi kuantitatif terkait hutan. Target yang dikuantifikasikan tidak cukup ambisius, dan sebagian di antaranya juga bergantung pada keuangan internasional.

Semua negara dengan tujuan mitigasi hutan harus:

- Dalam NDC, menetapkan berbagai target kehutanan yang spesifik, dapat diukur, dan berbatas waktu, dan menentukan proses untuk mencapai berbagai target ini
- Mendukung pembangunan kapasitas bagi perwakilan NDC untuk meningkatkan profil hutan sebagai solusi iklim dalam berbagai arena kebijakan nasional.
- Mendukung potensi mitigasi yang dapat dilaksanakan (feasible) dalam berbagai aktivitas mitigasi berbasis hutan dalam negara, dengan mempertimbangkan data spasial global serta data nasional, mengikut konteks.

Negara berkembang dan maju dapat mencapai dan merintis kemitraan untuk kerja sama bilateral dan/atau non-pasar untuk mempercepat mitigasi berbasis hutan berdasarkan Pasal 6.2 dan 6.8 Perjanjian Paris.

KEUANGAN

Bagaimana para pemerintah dapat meningkatkan investasi mereka untuk mewujudkan tujuan mitigasi hutan?

Untuk mewujudkan potensi mitigasi hutan, para pemerintah harus secara masif meningkatkan investasi domestik dan dukungan internasional mereka. Aliran keuangan saat ini hanya merupakan fraksi yang sangat kecil dari apa yang dibutuhkan. Para pemerintah juga harus berinvestasi dalam "menghijaukan" pembiayaan "kelabu" yang berdampak negatif terhadap hutan. Hal ini boleh mencakup penyaluran finansial yang ada menuju kepada aktivitas pendorong penggundulan hutan dari lahan berhutan ke lahan tidak berhutan, dan mendukung praktik berkelanjutan seperti pertanian yang regeneratif dan cerdas iklim (climate-smart).

Semua negara dengan tujuan mitigasi hutan harus:

- Sesuai dengan komitmen terhadap Pasal 2.c Perjanjian Paris, menilai dampak kebijakan fiskal terhadap hutan domestik dan internasional. Mengambil tindakan lebih lanjut untuk "menghijaukan" pembiayaan kelabu: mereformasikan subsidi untuk memberikan manfaat bagi hutan dan sasaran pembangunan berkelanjutan yang lain dan termasuk pengamanan lingkungan dan sosial bagi semua subsidi.
- Mengharuskan pelaku finansial sektor pemerintah dan swasta untuk mengungkapkan risiko dan manfaat hutan bagi investasi mereka dalam sektor seperti infrastruktur, pembangunan pertambangan, dan produksi komoditas berisiko hutan. Hal ini mencakup investasi di luar negeri.
- Memobilisasikan pendanaan sektor swasta untuk memperbesar usaha untuk mencapai tujuan hutan nasional sesuai dengan Perjanjian Paris, dengan mendongkrak peningkatan minat terhadap pasar karbon, mekanisme penetapan harga karbon, dan investasi berkelanjutan lain dalam konservasi atau penggunaan hutan secara berkelanjutan.
 Memastikan integritas lingkungan dan sosial dari aktivitas-aktivitas ini.
- Mempertimbangkan penggunaan tindakan pembatasan bagi karbon untuk mendapatkan penghasilan untuk berinvestasi dalam tujuan mitigasi hutan.

Negara berkembang dan negara maju, melalui kemitraan, boleh:

- Sesuai dengan Pasal 9 Perjanjian Paris, negara maju harus menunaikan kewajiban mereka untuk memberikan sumber daya keuangan untuk membantu negara berkembang, termasuk untuk tujuan mitigasi hutan.
- Membuat skema pembiayaan bagi target NDC kondisional di negara-negara berkembang dan memerinci komitmen konkret bagi dukungan internasional oleh negara-negara maju.
- Memulai dialog antara berbagai inisiatif donor untuk keuangan REDD+ berbasis hasil (results-based finance) dan negara-negara hutan untuk mengharmonisasikan dan menyederhanakan persyaratan, menjadikan persyaratan tersebut dapat diterapkan untuk konteks negara individual.
- Mengembangkan mekanisme tambahan untuk melengkapi pembiayaan berbasis hasil dengan dukungan bagi investasi up-front untuk penerapan program-program REDD+.

IMPLEMENTASI

Bagaimana para pemerintah dapat memajukan usaha mereka untuk melindungi dan memperbaiki hutan?

Strategi dan tujuan hutan harus berada di depan dan pusat proses pembuatan keputusan yang melibatkan berbagai kelompok stakeholders yang berbeda dan mencakup berbagai level pemerintah dan sektor, dalam process yang inklusif dan transparan. Menegakkan tujuan hutan dalam pembuatan kebijakan tidak berarti bahwa semua penggundulan hutan dapat atau harus dihentikan. Hal itu berarti bahwa layanan dan kontribusi hutan untuk generasi sekarang dan yang akan datang dinilai secara cermat dan diregenerasikan. Kehilangan apa pun harus dijustifikasikan oleh manfaat pembangunan berkelanjutan yang lain.

Para pemerintah membawa pengaruh signifikan dalam menetapkan prioritas bagi kebijakan yang mempengaruhi hutan. Dengan membuat skema spasial dan makroekonomi, mereka menetapkan jalur pembangunan nasional. Dengan mempertimbangkan gambaran lengkap bagaimana lahan digunakan di seluruh negara masing-masing, para pemerintah dapat membuat keputusan strategis yang mencapai berbagai tujuan. Sebagai contoh, pemerintah dapat mengonservasi area tertentu hutan primer, sambil mengelola wilayah tidak berhutan lain untuk penggunaan yang dianggap sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan – tidak hanya untuk menguntungkan kaum elit kecil. Pembuat kebijakan juga dapat mempertimbangkan untuk mengalihkan pembangunan berskala besar (misalnya, infrastruktur, pertanian, pertambangan) ke wilayah tidak berhutan atau menetapkan persyaratan tertentu untuk meminimalkan kerusakan.

Untuk mendukung proses ini dalam jangka panjang dan mengatasi volatilitas politik, para pemerintah harus membentuk konstituensi untuk tujuan mitigasi hutan dan pembangunan berkelanjutan.39, 91 Untuk mencapai hal ini, para pemerintah harus memberdayakan masyarakat sipil, petani kecil, dan, terutama, Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal, yang telah melindungi dan menghargai hutan secara tradisional. Secara khusus, para

pemerintah harus memastikan partisipasi dan keterlibatan mereka dalam pembuatan keputusan yang mempengaruhi lahan hutan adat dan mata pencaharian mereka. Para pemerintah juga dapat berkontribusi secara aktif menuju narasi yang lebih positif tentang pengaman dan peningkatan hutan dengan menekankan dan memajukan manfaat ekonomi, budaya, dan sosialnya.³⁹

Tidak ada solusi singkat - para pemerintah harus menerapkan dan menyelaraskan kombinasi strategi untuk melindungi, memulihi dan meningkatkan hutan. Aktivitas mitigasi hutan mengharuskan solusi komprehensif, menghasilkan insentif serta disinsentif untuk pihak-pihak yang mempengaruhi penggunaan hutan, lahan, dan sumber daya. Daftar berikut ini memberikan rekomendasi bagi para pemerintah berdasarkan strategi-strategi yang diidentifikasi dalam Bab 4.

Strategi-strategi kepada para pemerintah



Mengakui dan mengamankan hak masyarakat adat dan komunitas lokal (MAKL)



Memperkuat tata kelola penggunaan lahan dan hutan



Menyelaraskan insentif dengan tujuan mitigasi hutan



Memperluas tindakan dari sisi permintaan para pemerintah yang mengimpor komoditas berisiko hutan



Mendukung kolaborasi "multistakeholder" sebagai bagian dari pendekatan yurisdiksional



Memastikan akuntansi dan pemantauan hutan yang matang



STRATEGI 1.

Memperkuat tata kelola penggunaan lahan dan hutan

Tata kelola penggunaan lahan dan hutan yang matang amat penting untuk memerangi penggundulan hutan dan konversi hutan yang ilegal, serta menyelaraskan tujuan hutan dengan tujuan pembangunan. Tata kelola yang kuat dan berkelanjutan akan berdampak positif terhadap penerapan dan penegakan kebijakan manajemen, restorasi, dan konservasi hutan.

Semua negara dengan tujuan mitigasi hutan harus:

- Menangani berbagai kelemahan dalam kerangka hukum untuk hutan dan penggunaan lahan. Hal ini mungkin membutuhkan pengklarifikasian mandat kelembagaan, regulasi, dan undang-undang yang bertumpang tindih dan tidak jelas; menyelaraskan kerangka hukum di sektor hutan dan non-hutan; dan meningkatkan kesadaran rakyat dan permahaman hukum yang terkait.
- Berinvestasi dalam berbagai badan pemerintah untuk memastikan bahwa badan-badan tersebut mampu menerapkan hukum; termasuk, sebagai contoh, menerapkan proses sertifikasi lahan untuk mengakui hak lahan dan mengatasi konflik tentang hak penguasaan lahan.
- Memberikan mandat dan sumber daya yang memadai kepada badan penegakan dan badan anti-korupsi untuk memerangi penggunaan ilegal lahan dan hutan.
- Meningkatkan partisipasi dalam pembuatan keputusan dan pembagian manfaat menyangkut penggunaan lahan dan hutan, dengan memastikan bahwa proses-proses partisipasif dapat diakses oleh semua kelompok, terutama perempuan, masyarakat adat dan komunitas lokal (MAKL), dan pihak-pihak lain yang biasanya tidak disertakan.
- Meningkatkan proses transparansi dan mekanisme semak dan imbang (checks and balances) untuk memerangi korupsi di sektor lahan dan hutan. Hal ini mungkin mengharuskan pembatasan kebijakan pemerintah dalam menyetujui konsesi, mengadopsi aturan yang matang untuk mencegah konflik kepentingan; menjadikan perjanjian yang berkaitan dengan konsesi dapat diakses secara luas; dan memastikan transparansi pengumpulan dan penggunaan penghasilan sektoral.

- Mempertimbangkan semua ekosistem alam yang dipengaruhi oleh komoditas yang berisiko mendorong konversi hutan dan habitat, dalam perundang-undangan dan komitmen dan kebijakan berbasis pasar.
- Menangani berbagai kelemahan regulasi dan memastikan penerapan yang benar terhadap penilaian dampak lingkungan dan sosial untuk pembangunan yang mempengaruhi hutan, dengan mempertimbangkan semua dampak langsung, tidak langsung, dan kumulatif negatif terhadap hutan, dan memprioritaskan pencegahannya (misalnya dari pertambangan dan pengelolaan hutan).
- Menghentikan dan membatalkan pengunduran daripada pengamanan lingkungan dan sosial yang diadopsi karena kemunculan COVID-19, dengan secara cermat menilai implikasi jangka panjangnya bagi hutan dan pembangunan berkelanjutan.



STRATEGI 2.

Mengakui dan mengamankan hak masyarakat adat dan komunitas lokal (MAKL)

Meskipun memiliki peran sangat penting dalam perlindungan, restorasi, dan manajemen berkelanjutan atas hutan, MAKL dipengaruhi secara tidak sebanding oleh penggundulan hutan, sehingga mengancam tempat tinggal, sumber nafkah, serta kesejahteraan budaya dan spiritual mereka. Investasi dalam mengamankan hak lahan komunal yang sekarang belum diakui dapat melindungi wilayah hutan dan jasa ekosistemnya – termasuk penangkapan dan penyimpanan (sekuestrasi) karbon.

Semua negara dengan tujuan mitigasi hutan harus:

- Menjadikan pengakuan dan keamanan hak guna lahan dan hak lahan MAKL, dan komunitas bersifat sentral dalam strategi dan penerapan mitigasi iklim nasional.
- Melindungi lahan MAKL komunal dengan menegakkan hak-hak ini lewat penerapan mekanisme pemantauan, melakukan tindakan tegas terhadap aktivitas ilegal, dan mengambil tindakan terhadap pelaku kekerasan terhadap komunitas.

- Membuat peraturan perundang-undangan yang meningkatkan perlindungan terhadap lahan MAKL dan memberikan kekuasaan untuk menentukan dan mengelola keberlanjutan hutan mereka. Hal ini mungkin mengharuskan reformasi di beberapa negara atau memperkenalkan undang-undang baru di negara-negara lainnya.
- Mencabut perundang-undangan yang ada yang merusak, melemahkan, atau mengancam hak-hak MAKL dan menggantinya dengan kebijakan dan aturan suportif.
- Memprioritaskan pendaftaran dan sertifikasi lahan adat dengan memulai proses di tempat prioritas itu belum ada atau dengan meningkatkannya di tempat prioritas itu telah dimulai.
- Merampingkan proses untuk pengikutsertaan (inklusi), dengan memandatkan dan menegakkan proses persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (FPIC) berkaitan dengan lahan adat dan komunal
- Menyalurkan pendanaan dan sumber daya pada level domestik dan internasional untuk peningkatan atas keamanan dan pengakuan lahan MAKL secara global.



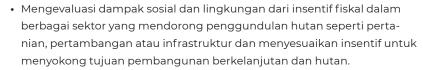
STRATEGI 3.

Menyelaraskan insentif dengan tujuan mitigasi hutan

Arus pembiayaan pemerintah, kebijakan fiskal, dan kebijakan pembangunan yang lebih luas memiliki pengaruh yang kuat terhadap bagaimana hutan dan sumber daya dikelola. Kebijakan dan perencanaan ekonomi tidak harus berkonflik dengan tujuan hutan; tindakan menyelaraskan instrumen yang ada dengan mengintensifkan penggunaan berkelanjutan dan perlindungan hutan, sambil menyokong mata pencaharian, dapat menyokong tujuan pembangunan berkelanjutan.

Semua negara dengan tujuan mitigasi hutan harus:

 Memanfaatkan kebijakan fiskal sebagai perkakas untuk menyokong penggunaan hutan berkelanjutan secara kreatif dan efektif, dan bukan mendorong penghancuran hutan.



- Meningkatkan pengelolaan penghasilan sektor penggunaan lahan untuk memastikan penghasilan tersebut dikumpulkan dan didistribusikan sebagaimana yang diwajibkan menurut hukum. Hal ini mungkin membutuhkan pengawasan ketat terhadap korupsi dan peningkatan investasi untuk memperkuat sistem manajemen keuangan.
- Mengombinasikan program dukungan produktivitas untuk petani dan petambang skala kecil dengan investasi dalam kondisi pemungkin (enabling conditions) dan insentif ekonomi yang bertarget untuk memastikan peningkatan mata pencaharian tanpa penambahan konversi hutan.
- Mengurangi hambatan struktural terhadap manajemen hutan komunitas serta aktivitas ekonomi lain yang dikelola komunitas. Hal ini mungkin mengharuskan reformasi kerangka hukum, investasi dalam kapasitas memperkuat perhimpunan. dan pengaktifan akses pasar.
- Memperluas pembayaran untuk skema jasa ekosistem, didukung oleh hak guna lahan yang aman dan pembangunan kapasitas, untuk menjangkau pelaku petani kecil dan mengadakan pendanaan jangka panjang untuk manajemen hutan yang berkelanjutan.
- Berinvestasi dalam dukungan teknis dan finansial untuk berbagai program sosial dan pengelolaan hutan komunitas untuk mendorong peningkatan mata pencaharian lokal dan usaha hutan berkelanjutan.



STRATEGI 4.

Mendukung kolaborasi multistakeholder kepentingan sebagai bagian dari pendekatan yurisdiksional

Untuk menangani pendorong penggundulan hutan dan menyokong aktivitas mitigasi hutan, para pemerintah harus mendorong peralihan dari pembuatan keputusan dan praktik bisnis-seperti-biasa. Hal ini mencakup kebijakan pembangunan nasional dan sektoral dan semua pelaku yang berdampak pada hutan dan penggunaan lahan. Kolaborasi dan koordinasi inklusif dan partisipatif antara berbagai sektor dan stakeholder dibutuhkan untuk mengatasi perbedaan mendasar dalam kepentingan dan kekuasaan.

Semua negara dengan tujuan mitigasi hutan harus:

- Mendukung dialog dan forum multistakeholder yang bersifat kolaboratif, partisipatif, dan inklusif. Membawa para stakeholder ke perundingan

 seperti kelompok MAKL, yang mungkin dikeluarkan dari pembuatan keputusan – adalah langkah pertama yang diperlukan. Forum-forum ini perlu dibangun berdasarkan lembaga informal yang sudah ada, termasuk peran kepemimpinan tradisional, praktik lokal dalam bidang manajemen sumber daya, dan modal sosial.
- Melibatkan dan memberikan suara yang kuat bagi pelaku masyarakat sipil dalam proses pembuatan keputusan untuk menangani ketidakseimbangan kekuasaan dan mengedepankan sudut pandang dan kebutuhan lokal. Forum multistakeholder akan tidak efektif, dan mereproduksi perbedaan kekuasaan yang tidak setara, ketika berbagai kepentingan bisnis-seperti-biasa yang dominan dan berurat akar mengumpulkan mereka.
- Memasukkan pemerintah subnasional dalam dialog pembangunan berkelanjutan dan menerapkan strategi hutan nasional.
- Melembagakan berbagai inisiatif dan program seperti platform multistakeholder dan kemitraan untuk mengurangi kebergantungan mereka terhadap kehendak politik dan pemerintah yang berubah-ubah.
- Mendukung jaringan berbagi pengetahuan dan kolaborasi lokal untuk memperkuat lembaga lokal dan kemampuan mereka untuk berpartisipasi efektif dalam proses pembuatan keputusan nasional dan internasional.



STRATEGI 5.

Memastikan akuntansi dan pemantauan hutan yang matang

Banyak negara telah membuat kemajuan signifikan dalam membangun sistem pemantauan hutan mereka dan dalam menciptakan level referensi untuk REDD+ berbasis hasil. Usaha lebih lanjut dibutuhkan untuk memperbaiki metodologi dan meningkatkan transparansi, serta untuk menyelaraskan sistem akuntansi dan pemantauan REDD+ dengan inventaris Gas Rumah Kaca (GRK) nasional yang merupakan bagian dari Kerangka Transparansi yang Ditingkatkan (*Enhanced Transparency Framework*). Hal ini akan mempengaruhi proses Pelaporan Global Secara Kolektif (*Global Stocktake*).

Semua negara dengan tujuan mitigasi hutan harus:

- Melaksanakan pertukaran Selatan-Selatan untuk berbagi pengalaman negara-negara yang telah memulai mengintegrasikan sistem pemantauan REDD+ mereka dengan inventaris GRK nasional.
- Memberikan bantuan teknis untuk meningkatkan metodologi dan kapasitas, termasuk bagi konteks lokal yang berbeda, seperti hutan heterogen dan hutan yang sangat berkeanekaragaman hayati (highly biodiverse).
- Memberikan bantuan keuangan dan pembangunan kapasitas untuk sistem pemantauan hutan, termasuk untuk penyelarasannya dengan persyaratan dan inventaris GRK dengan kerangka transparansi yang ditingkatkan, dan untuk memungkinkan partisipasi komunitas lokal, dan secara khusus, masyarakat adat.
- Memastikan bahwa sistem dan data (termasuk lewat kemitraan pemerintah-swasta) transparan, disesuaikan dengan, dan menegakkan sistem dan prioritas nasional.
- Mendukung riset lokal dan memberdayakan komunitas dan organisasi masyarakat sipil untuk bertindak sebagai pengawas sistem pemantauan.



STRATEGI 6.

Memperluas tindakan dari sisi permintaan bagi pemerintah yang mengimpor komoditas berisiko hutan.

Usaha-usaha untuk mencegah agar komoditas terkait hutan yang ilegal dan tidak berkelanjutan tidak menemukan kebutuhan pasar untuk ditingkat-kan. Pemerintah – baik negara produsen maupun negara importir – dapat memainkan peran sentral dalam menciptakan permintaan untuk produk dan komoditas yang legal dan bebas penggundulan hutan.

Negara-negara konsumen, termasuk yang mengonsumsi komoditas berisiko hutan impor dan domestik harus:

- Mempertimbangkan kepentingan dan tanggung jawab bersama mereka dalam mengemukakan tujuan mitigasi hutan ke luar negeri. Hal ini mungkin membutuhkan penilaian atas jejak hutan global mereka di Kontribusi yang Ditetapkan Nasional (NDC) dan memulai proses untuk menguranginya. Sebagai contoh, negara-negara tersebut dapat menyelaraskan kebijakan perdagangan mereka dan memastikan penegakan efektif atas regulasi impor yang bertujuan untuk mengurangi penggundulan hutan dalam komoditas.
- Menetapkan persyaratan yang membatasi masuknya produk-produk yang telah menyebabkan penggundulan hutan. Persyaratan uji tuntas (due diligence) yang diberlakukan di negara-negara konsumen utama adalah langkah dalam arah yang benar: penegakan dan penerapan tindakan-tindakan ini perlu dipercepat.
- Memperkenalkan kebijakan pengadaan publik yang membatasi dimasukkannya komoditas ilegal dan berisiko penggundulan hutan dalam pembelian publik.
- Meningkatkan transparansi di keseluruhan rantai pasokan komoditas berisiko hutan lewat pemantauan hutan dan data yang terbuka dan dapat diakses tentang konsesi hutan. Hal ini mungkin mengharuskan peningkatan dan penopangan transparansi sektor hutan untuk menghapuskan korupsi secara bertahap dalam jangka panjang.
- Memperluas perjanjian bilateral antara produsen dan negara pembeli di keseluruhan produk berisiko penggundulan hutan. Hal ini mungkin mencakup penggunaan tindakan pembatasan (border measures) bagi

karbon untuk memasukkan (internalize) biaya penggundulan hutan dan memastikan bahwa dampak negatif terhadap petani kecil dan negara miskin diminimalkan.

- Menyelaraskan perjanjian perdagangan bebas dengan tujuan Perjanjian Paris. Hal ini dapat mencakup penetapan ketentuan yang kuat dan mengikat untuk emisi yang diimpor dan mengharuskan perlindungan untuk semua aktivitas perdagangan dan investasi.
- Berkolaborasi dengan pemerintah negara-negara produsen untuk memperkuat penegakan hukum nasional.